

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Juniadi soemarto. Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Pengawasan Dalam Penanggulangan, Jakarta: Restu Agung, 1995

Andi hamzah. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta:PT .Gramedia,1986

J.E.Sahetapy. Kapita Selektu Kriminologi. Bandung Alumni, 1997

Leaden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi. Djambata, Jakarta, 2001

W.J.P. Pompe. Handboek van het Nederlandsche Strafrecht, NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Wilink, Zwollo, 1959

Tindak Pidana Korupsi. Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000

P.A.F. Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1991

Soejono Dirdjosisworo. Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. dalam: Pustaka Peradilan Jilid IX, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1995

DR.Andi Hamzah, SH . Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2010

Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia. Sinar Grafika Jakarta, 2010

Sudarto, Kapita Selecta Hukum Pidana. Alumni Bandung, 2006

Barda Nawawi Arief. Beberapa Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan

Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia, Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia, Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atas perubahan Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Whistle Blower dan Justice Collaborator.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

LAIN-LAIN

<http://www.wikipedia.go.id/artikel>. Htm (diakses pada tanggal 10 Juni 2013, 10:20 WIB)

<http://www.utama.seru.go.id/artikel> Htm (diakses pada tanggal 11 Juni 2013 09:30 WIB)

Badudu dan Zain Muhammad. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1996